

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

chrisna dwi heryanti

chrisna.yanti74@gmail.com

Dr. Wahidahwati, SE., M.Si., Ak., CA.

wahidahwati@stiesia.ac.id

Dr. Bambang Suryono, SE., SH., M.Ak., Ak., CA.

bambang_ppmb@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Abstract

To achieve regional independence, local governments must be able to manage their resources efficiently and effectively. It can be realized by decentralization policy through regional autonomy. This research aims to test the influence of PAD, balancing fund and economic growth on financial performance of district/city government in East Java province. The scope used in this research is the realization report of the District government's APBD/city in East Java province year 2015 – 2017, especially emphasizing on PAD variables, balance fund, economic growth, capital expenditure and financial performance. Analyses and hypotheses were conducted using SPSS 24 programs. Data analysis methods on hypothesis testing using multiple linear regression analyses. The results showed that (1) PAD has a significant positive effect on financial performance which means the increase in PAD will increase the financial performance of district/city government in East Java Province, (2) Balancing fund negatively affect significant impact on financial performance which means the increase of the balancing fund will lower the financial performance of the Regency/city government in East Java Province, (3) Economic growth has no significant effect on financial performance which means Increase in the economic growth of an area, not always followed by the increase in financial performance of the District government/city in East Java and (4) capital expenditure is not significant to the financial performance which means capital expenditure Increase in an area, not necessarily increase the financial performance of the local government in a short period of time.

Key words: Original Regional Income, balancing fund, economic growth, capital expenditure, financial performance

ABSTRAK

Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2017, terutama menekankan pada variabel PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi,

Belanja Modal dan Kinerja Keuangan. Analisis dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24. Metode analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan Dana Perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dan (4) Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti belanja modal meningkat pada suatu daerah, tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam jangka waktu singkat.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Hal tersebut membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah, yaitu perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah, hubungan keuangan serta membawa perubahan penting dalam pengelolaan pemerintah daerah.

Dalam mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasari oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah jauh lebih memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga dianggap lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah tentunya disertai dengan pendelegasian, pengalihan dan penyerahan tanggungjawab. Baik berupa pembangunan sarana dan prasarana, pendanaan, maupun peningkatan SDM dalam kerangka desentralisasi fiskal. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pendelegasian kewenangan pendanaan yang diserahkan ke pemerintah daerah, yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah masing-masing dan mekanisme pembagian dana perimbangan keuangan pusat-daerah.

Kewenangan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dilakukan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pelaksanaan mekanisme pembagian dana perimbangan keuangan pusat-daerah, yaitu dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 33/2004).

Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan sumber penerimaan keuangan daerahnya untuk mencukupi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Secara Umum keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat yang disebut Dana Perimbangan.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) dalam penelitian mereka menyatakan, PAD merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Tingginya PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memberikan kemudahan atas kinerja dan transaksi belanja daerah maupun pengeluaran lainnya sebagai kebutuhan Pemerintah daerah. Penelitian Retnowati (2016), juga menggunakan variabel kekayaan daerah untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Moral hazard pemerintah daerah sering dipertanyakan, dalam hal ini tentang kelanjutan penggunaan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang tinggi, sehingga pos alokasi untuk belanja modal perlu diperhatikan. Penelitian Handayani (2011) menyebutkan bahwa, daerah yang maju cenderung mempertahankan struktur belanja menjadi belanja pemeliharaan, tidak serta-merta untuk belanja modal saja. Permasalahan krusial di pemerintah daerah adalah tentang pergeseran pola belanja, mengingat sejauh mana pentingnya diadakan pendanaan untuk belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Rozaqi (2012) menyebutkan, bahwa dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat, sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian.

Pergeseran pola belanja dalam pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan masyarakat menjadikan motivasi yang melandasi penelitian ini. Yang menjadi pemicu permasalahan tentang sejauh mana besarnya pendapatan daerah mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan publik.

Belanja modal untuk pelayanan publik adalah belanja yang digunakan untuk menambah aset maupun membiayai kegiatan investasi. Tujuannya adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada daerah dengan kondisi infrastruktur daerah yang masih minim, maka perolehan kenaikan PAD seharusnya lebih banyak diarahkan untuk belanja modal ketimbang belanja lainnya.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan pada PAD nya. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 5%. Dalam anggaran tersebut terserap pada di beberapa proyek seperti, pembangunan infrastruktur jalan termasuk pembebasan tanah maupun penanggulangan banjir.

Target untuk potensi PAD tersebut sudah dipetakan. Pemerintah daerah telah menargetkan kenaikan potensi PAD nya dan telah memetakannya, di antaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air dan tanah,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, diperlukan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang tujuannya mengurangi ketimpangan pendanaan, baik vertikal maupun horizontal. Dana transfer tersebut dimasukkan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, penerimaan dana perimbangan dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tahun 2015 sebesar 0,58 %, tahun 2016 sebesar 0,67 % dan di tahun 2017 adalah sebesar 0,69 %.

Melihat perkembangan kabupaten/kota di Jawa Timur sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja pemerintah dalam peningkatan perekonomian masyarakat sangat baik. Perekonomian tradisional mulai ditata dengan cara memperbaiki dan merevitalisasi pasar-pasar tradisional supaya geliat perekonomian masyarakat tingkat bawah juga stabil. Karena pasar tradisional masih menjadi denyut nadi perekonomian pemerintah daerah di Jawa Timur. Rata-rata peningkatan perekonomian ditunjukkan dari kenaikan PDRB dari tahun 2015 sebesar 5,31% yang kemudian meningkat di tahun 2016 sebesar 5,64% dan menurun di tahun 2017 sebesar 5,35%. Peningkatan PDRB diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu yang sama.

Geliat perkembangan ekonomi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, juga dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang tiap tahun dikerjakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur juga digunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah. Akan tetapi pada tahun 2015 terjadi inflasi yang berakibat turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain dengan naiknya tarif dasar listrik, dicabutnya subsidi BBM oleh pemerintah untuk BBM non premium, serta naiknya Upah Minimum Regional.

Penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) dan Retnowati, (2016) menggunakan variabel dana perimbangan untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Faktor lainnya adalah belanja daerah/ belanja modal. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Penelitian oleh Pratama et al, (2015) menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pendidikan, peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Retnowati (2016) juga menggunakan variabel belanja modal untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Melihat latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (3) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Batasan dalam penelitian ini adalah dengan melihat Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur dari tahun 2015-2017, terutama menekankan pada komponen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini, kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur perlu diprioritaskan, karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan asli daerah adalah penambah nilai kekayaan bersih yang berhak diakui pemerintah daerah. Undang - Undang nomor 33 tahun 2004 menyebutkan, bahwa tujuan dari Pendapatan Asli Daerah yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah seiring potensi di daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi. Sedangkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ada pemisahan empat jenis pendapatan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pendapatan dari hasil pajak daerah, yaitu pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
2. Pendapatan dari hasil retribusi daerah, yaitu pendapatan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah. Atau dengan kata lain, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti: retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair, dll.
3. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN.
4. Pendapatan lain-lain PAD yang sah, contohnya seperti hasil penjualan aset daerah , jasa giro, pendapatan bunga, dll.

2. Dana Perimbangan

UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19 menjelaskan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah: untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dana ini berdasarkan prosentase angka untuk pembiayaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber Dana Bagi Hasil berasal dari:
 - a. Pajak, seperti: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mana pemerintah daerah mengambil 90% dari hasil pajak bumi dan bangunan daerahnya.
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebanyak 20% untuk negara dan 80% untuk daerah, dengan rincian 64% untuk provinsi dan 16% untuk kabupaten/kota. dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
 - c. Sumber Daya Alam (SDA), seperti: pertambangan gas bumi, pertambangan umum, perikanan, kehutanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), pengalokasian dana ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), pengalokasian dana ini bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu indikator, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu negara akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode.

Menurut Sukirno (2006), ada perbedaan istilah dengan arti yang sedikit berbeda, antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun Keduanya memang menerangkan tentang perkembangan ekonomi yang berlaku, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi dipakai sebagai istilah suatu ungkapan umum yang mendeskripsikan tingkat perkembangan suatu daerah atau negara, ukurannya melalui prosentase pertambahan pendapatan nasional riil. Sedangkan Istilah pembangunan ekonomi biasanya terkait dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dalam penelitian Maryati dan Endarawati (2010), menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat suatu daerah. Secara makro pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahunnya. Untuk PDRB diukur atas dasar harga konstan.

4. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran, yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya, yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan bertambahnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, maka diharapkan pertumbuhan perekonomian di daerah akan meningkat. Pembangunan infrastruktur di daerah yang banyak dilakukan, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah (Aprilia, 2016).

Ada beberapa jenis Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah.

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Adalah biaya/pengeluaran yang digunakan untuk penambahan/ pengadaan/ penggantian, untuk pengawasan, perencanaan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas gedung dan bangunan dalam kondisi siap digunakan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Adalah biaya/ pengeluaran yang digunakan untuk penambahan/ pengadaan/ penggantian/ peningkatan pembuatan serta perawatan dan termasuk biaya untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap digunakan.

e. Belanja Modal Fisik lainnya.

Adalah biaya/ pengeluaran yang digunakan untuk penambahan/ pengadaan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya, termasuk dalam belanja ini adalah pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, jurnal ilmiah dan belanja modal kontrak sewa beli.

5. Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan, bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Wibowo (2011) menegaskan, bahwa perlunya dilakukan pengukuran terhadap kinerja dengan tujuan untuk mengetahui, apakah dalam pelaksanaan kegiatan terdapat perbedaan dari rencana yang ada, atau kinerja bisa dilakukan sesuai jadwal, atau hasil kinerja apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini juga membagi ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Menurut Mardiasmo (2004), dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap

pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya salah satu alatnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Penelitian Susantih dan Saftiana (2009) menyebutkan, bahwa penggunaan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Elemen utama dalam konsep pengelolaan keuangan sektor publik, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ukuran efisiensi digunakan dalam pengukuran kinerja. Efisiensi adalah dengan input tertentu akan menghasilkan pencapaian output yang maksimum dan sebaliknya. Menurut Mardiasmo (2009), proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota digunakan dengan rumus efisiensi dan pengukurannya menggunakan rasio output terhadap input.

Hipotesis

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

H₂: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

H₃: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Kerangka Konseptual

Variabel Independen:

PAD (X₁) H1

DP (X₂) H2

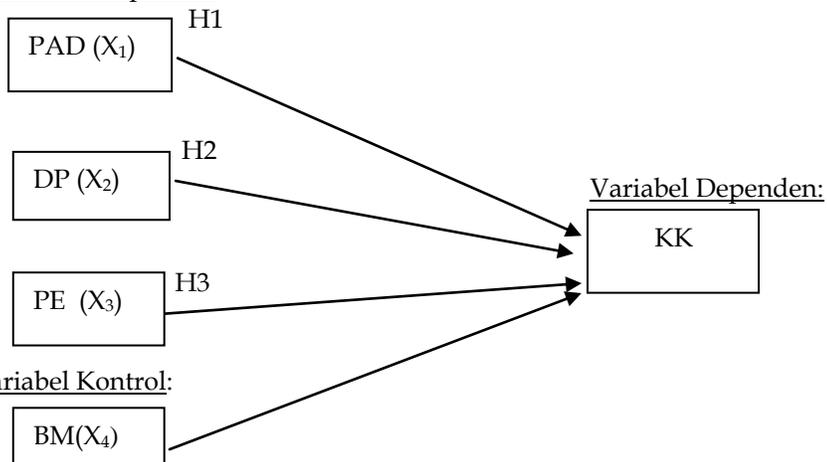
PE (X₃) H3

Variabel Kontrol:

BM(X₄)

Variabel Dependen:

KK



Gambar 1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan

angka, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Teknik Penelitian ini menggunakan Penelitian Kausal Komparatif (*Causal Comparative Research*), yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel (Wicaksono, 2014).

Gambaran Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang berjumlah 38 kabupaten/kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara metode sensus, yaitu dengan mengambil semua data laporan realisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- 1) Memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.
- 2) Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Timur tahun 2015- 2017.
- 3) Informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini terutama yang didapat dari jurnal, surat kabar, maupun internet.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Dependen

Indikator untuk mengukur variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut (Gustra, 2014) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal:

$$RDFF = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan di daerahnya sendiri.

2. Variabel Independen

1. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah, yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) + Lain PAD yang Sah.

Rasio PAD diukur dengan melihat nilai PAD yang telah disajikan dalam laporan Realisasi APBD kota yang bersangkutan dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Marizka, 2013) :

$$PAD = \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2. Dana Perimbangan.

Indikator untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

Dana Perimbangan = Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil Bukan Pajak + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus.

Rasio Dana Perimbangan diukur, dengan melihat nilai Dana Perimbangan yang telah disajikan dalam laporan Realisasi APBD Provinsi yang bersangkutan, dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Marizka, 2013):

$$DP = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

3. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, biasanya diikuti pula oleh tingginya kesejahteraan masyarakat.

Rasio Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan melihat nilai PDRB tahun ini dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya (Marizka, 2013):

$$PE = \frac{(\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Umumnya variabel kontrol sering digunakan peneliti untuk jenis penelitian perbandingan. Pada penelitian ini menggunakan Belanja Modal sebagai variabel kontrol. Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Rasio Belanja Modal diukur dengan menggunakan rumus (Tahar dan Suwandi, 2015):

$$BM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model regresi antar variabel bebas saling berkorelasi. Untuk mengujinya dapat dilihat nilai *tolerance* atau VIF. Dikatakan tidak mengandung multikolinearitas, apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10.

- b. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan uji *glejser*. Nilai absolut diregresikan tiap-tiap variabel bebas. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen dengan p-value > 0,05 maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.
- c. Uji Autokorelasi
Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Penarikan kesimpulan apakah terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah jika $du < dw$ hitung < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis data dan hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) 24. Regresi linier berganda yang digunakan pada pengujian hipotesis adalah untuk menguji pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Model Regresi dalam penelitian ini adalah:

$$KK = \beta + \beta_1 PAD + \beta_2 DP + \beta_3 PE + \beta_4 BM + \mu$$

Di mana :

KK = Kinerja keuangan pemerintah

β = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = parameter

PAD = Pendapatan asli daerah

DP = Dana perimbangan

PE = pertumbuhan ekonomi

BM = belanja modal

μ = faktor gangguan (*disturbance error*)

3. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Analisis koefisien determinasi berganda (R^2) digunakan, untuk mengukur seberapa besar variasi naik turunnya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap variasi naik turunnya Kinerja Keuangan.

4. *Uji Goodness Of Fit*

Untuk menguji kelayakan model regresi linear berganda dalam mengukur pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen digunakan Uji *goodness of fit* dengan uji F.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian secara statistik dilakukan setelah dinyatakan bebas dari uji penyimpangan asumsi klasik. Uji statistik adalah dengan menggunakan Uji *t*. Uji *t* ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Pendapata Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

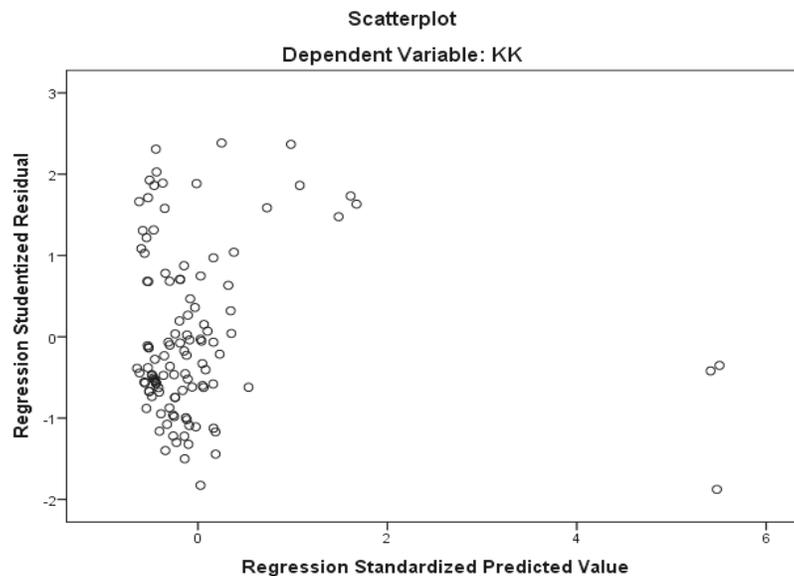
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,398	2,513
DP	,407	2,457
PE	,981	1,019
BM	,947	1,056

a. Dependent Variable: KK.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel di atas diketahui, bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), pertumbuhan ekonomi (PE), dan belanja modal (BM) mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10, maka penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari Gambar tersebut diketahui, bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji Glejser, yaitu dengan cara meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolut residual dari regresi.

Tabel 2
Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,064	,023		2,793	,006
	PAD	-,010	,005	-,309	-1,581	,091
	DP	-,085	,031	-,390	-1,599	,063
	PE	,001	,001	,143	1,584	,116
	BM	,090	,040	,208	1,268	,253

a. Dependent Variable: ABS_RES.

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser di atas, menunjukkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel sebesar $> 0,05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,911 ^a	,830	,824	,03874	1,055

a. Predictors: (Constant), BM, PE, DP, PAD.

b. Dependent Variable: KK.

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel di atas diketahui, bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson berada di antara -2 dan 2 yaitu sebesar 1,055.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	,257	,043		5,998	,000		
PAD	,103	,009	,729	11,635	,000	,398	2,513
DP	-,207	,057	-,225	-3,635	,000	,407	2,457
PE	,001	,002	,022	,559	,577	,981	1,019
BM	-,045	,074	-,025	-,614	,541	,947	1,056

a. Dependent Variable: KK.

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel di atas diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KK = 0,257 + 0,103 \text{ PAD} - 0,207 \text{ DP} + 0,001 \text{ PE} - 0,045 \text{ BM}$$

Penjelasan dari model regresi linier berganda di atas :

1. Terdapat nilai konstanta sebesar 0,257.

Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), pertumbuhan ekonomi (PE), dan belanja modal (BM) sama dengan nol, maka kinerja keuangan (KK) akan sebesar 0,257.

2. Nilai koefisien pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,103.

Nilai koefisien regresi positif, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah. Artinya, setiap ada kenaikan pada variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami peningkatan sebesar 0,103 satuan. Dan sebaliknya setiap ada penurunan pada variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami penurunan sebesar 0,103 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain besarnya konstan.

3. Nilai koefisien dana perimbangan (DP) sebesar -0,207.

Nilai koefisien regresi negatif, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang berlawanan arah. Artinya, setiap ada kenaikan pada variabel dana perimbangan (DP) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami penurunan sebesar 0,207 satuan. Dan sebaliknya setiap ada penurunan pada variabel dana perimbangan (DP) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami peningkatan sebesar 0,207 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain besarnya konstan.

4. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,001.

Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi positif, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah. Yang artinya, setiap ada penurunan pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami penurunan sebesar 0,001 satuan. Dan sebaliknya setiap ada kenaikan pada variabel pertumbuhan ekonomi

(PE) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami peningkatan sebesar 0,001 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain besarnya konstan.

5. Nilai koefisien belanja modal (BM) sebesar -0,045.

Nilai koefisien regresi Belanja Modal negatif, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang berlawanan arah. Yang artinya, setiap ada penurunan pada variabel belanja modal (BM) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami kenaikan sebesar 0,045 satuan. Dan sebaliknya setiap ada kenaikan pada variabel belanja modal (BM) sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan (KK) akan mengalami penurunan sebesar 0,045 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain besarnya konstan.

Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Tabel 5
Koefisien Determinasi Berganda (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,911 ^a	,830	,824	,03874	1,055

a. Independent Variable: PAD, DP, PE, BM.

b. Dependent Variable: KK.

Sumber: data sekunder yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya R Square (R²) sebesar 83% atau 0,830.

Uji Goodness Of Fit

Untuk menguji kelayakan model regresi linear berganda, dalam mengukur pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, digunakan uji *goodness of fit* (Uji F).

Hasil uji *goodness of fit* dengan menggunakan program SPSS 24 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Goodness Of Fit
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,798	4	,199	132,848	,000 ^b
Residual	,164	109	,002		
Total	,961	113			

a. Dependent Variable: KK.

b. Predictors: (Constant), BM, PE, DP, PAD.

Sumber: data sekunder yang diolah.

Dari table diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model regresi linier berganda layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 7
Uji Hipotesis (uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,257	,043		5,998	,000
PAD	,103	,009	,729	11,635	,000
DP	-,207	,057	-,225	-3,635	,000
PE	,001	,002	,022	,559	,577
BM	-,045	,074	-,025	-,614	,541

a. Dependent Variable: KK.

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat:

1. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (KK).
2. Nilai signifikansi variabel dana perimbangan (DP) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan (DP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (KK).
3. Nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,577 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (KK).
4. Variabel belanja modal (BM) dengan nilai signifikansi sebesar 0,541 lebih besar dari 0,05. Dapat diartikan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (KK).

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari data diatas menunjukkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi (0,000) kurang dari 0,05, ini berarti bahwa hipotesis 1 (H1) diterima.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa, pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berusaha menaikkan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan daerah mereka. Ini terlihat pada data penelitian bahwa rata-rata penerimaan pendapatan asli daerah mereka meningkat dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Meningkatnya PAD pemerintah daerah pada 3 tahun terakhir ini bisa menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

PAD tersebut kemudian dialokasikan kepada pos-pos pembiayaan yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga tingkat kemandirian pemerintah daerah tinggi, tidak bergantung kepada bantuan eksternal (pemerintah pusat dan provinsi). Kondisi tersebut akan berdampak pula pada citra positif pemerintah, karena citra positif sebuah

pemerintah daerah sangatlah penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang kemudian diharapkan mampu menciptakan hubungan timbal balik positif serta peran masyarakat dalam membangun daerah itu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh: Purwasih (2016), Prasasti (2014), Budiando dan Stanly (2016), Andirfa, *et al.* (2016), dan Aprilia (2016), yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Armaja, *et al.* (2015) dan Kusumawardani (2012), yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima pemerintah daerah meningkat, maka resiko penyalahgunaan kekayaan juga akan semakin besar, yang kemudian akan berdampak buruk pada turunnya penilaian terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan, nilai signifikansi (0,000) kurang dari 0,05. Dan ini berarti bahwa hipotesis 2 (H2) ditolak.

Data yang diperoleh peneliti menunjukkan, meskipun hampir diseluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami peningkatan perolehan dana perimbangan rata-rata sebesar 15%, tapi ternyata tidak diimbangi dengan naiknya kemandirian keuangan daerah tersebut. Pengaruh Dana Perimbangan yang negatif terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa, setiap ada kenaikan pada variabel dana perimbangan maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Pemerintah daerah lebih menekankan pada menambah PAD untuk membiayai pos-pos yang bersifat meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan untuk pengeluaran di luar pos-pos tersebut, seperti pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang habis pakai, menggunakan dana perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat).

Karena jika semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kemandirian pemerintah daerah akan menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2016), Prasasti (2014), Armaja, *et al.* (2015), Budiando dan Alexander (2016), serta Andirfa, *et al.* (2016), yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusrina (2014) dan Aprilia (2016), yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Dana Perimbangan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,577, dan dari hasil penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa hipotesis 3 (H3) ditolak.

Hasil Penelitian ini mengindikasikan, bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipun pertumbuhan ekonominya ditahun 2015 rata-rata

sebesar 5,31% dan meningkat ditahun 2016 sebesar 5,64%, akan tetapi turun di tahun 2017 menjadi 5,35%. Perubahan ini lebih disebabkan karena faktor-faktor produksi di suatu daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka waktu singkat (satu tahun), akan tetapi memerlukan jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusrina (2014) yang menunjukkan, bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Demikian pula sebaliknya penurunan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolok ukur penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sukirno (2010) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kegiatan perekonomian yang mendorong bertambahnya produksi barang dan jasa ke masyarakat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,577.

Nilai negatif pada koefisien regresi variabel belanja modal dapat didefinisikan, apabila belanja modal meningkat pada suatu daerah, dengan terbangunnya infrastruktur dan pembelian aset modal lainnya di suatu daerah, tidak serta merta secara langsung dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dalam jangka waktu singkat. Atau bisa dikatakan juga bahwa belanja modal yang dikeluarkan, tidak menyentuh langsung pada program-program yang meningkatkan kinerja keuangan daerah, meskipun rata-rata belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur meningkat di tahun 2015 dan 2016, kemudian menurun di tahun 2017.

Temuan empiris ini juga menunjukkan bahwa besaran Belanja Modal belum mampu memberikan peran yang penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penggunaan anggaran Belanja Modal pada setiap pemerintah daerah yang tidak diarahkan pada semua kegiatan yang sifatnya investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga hasil yang diberikan dari belanja modal ini belum memberikan nilai yang positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. sehingga kinerja keuangan daerah yang diharapkan belum tercapai dengan maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh: Purwasih (2016) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armaja, *et al.* (2015), Andirfa, *et al.* (2016), serta Aprilia (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000.

2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,577.
4. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,577.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Agar Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat menggali potensi daerah lebih banyak lagi. Terutama pos-pos yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, menaikkan target pertumbuhan ekonomi dan lebih mengkhususkan pembelanjaan modal yang tepat sasaran.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian lebih dari 3 tahun, sehingga bias untuk generalisasi hasil penelitian yang berkaitan dengan pengukuran dengan periode yang singkat tersebut bisa dihindari oleh peneliti.
3. Dalam penelitian ini terdapat implikasi dari teori *Stewardship*, yang diharapkan pemerintah daerah dapat menggambarkan kejelasan eksistensinya sebagai suatu lembaga yang kredibel dan akuntabel di mata masyarakat. Dimana pemerintah daerah seyogyanya bertindak sesuai untuk kepentingan masyarakat luas dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan amanah yang dibebankan. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka *stewards* mengerahkan semua kemampuan untuk dapat menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.

Keterbatasan

Penelitian ini tak lepas dari beberapa keterbatasan yang tak dapat dihindari selama penelitian:

1. Penelitian ini menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian, sebaiknya memang menambah indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio yang lain seperti: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Belanja Modal terhadap total belanja, Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja dan Rasio Upaya Pajak (*tax effort*).
2. Dalam penelitian ini, hanya terbatas pada empat variabel, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mengarah pada sektor publik. Misalnya: variabel dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan belanja pegawai yang didukung dengan teori terbaru.
3. Adanya keterbatasan dalam Metoda Penelitian, beberapa cara penghitungan variabel memungkinkan mengandung beberapa kelemahan. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa menggunakan uji analisis kuantitatif yang lain seperti PLS sebagai bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Hasan Basri dan M.Shabri A.Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Aprilia, F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 2012-2013. *Skripsi*. UNS.
- Armaja., Ridwan I dan Aliamin. 2015. Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan (studi pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Budianto dan Stanly W, A. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi*. Vol 4, No 4.
- Gustra, A. 2014. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Natuna (Tahun Anggaran 2009 – 2013). *Jurnal Ekonomi*. Vol 1. No. 2
- Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNNES Semarang.
- Kusrina, B. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi pada daerah otonomi baru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Gunadarma.
- Mardiasmo. 2004. Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Marizka R. 2013. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di sumatra barat (tahun 2006-2011). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 3
- Maryati dan Endarawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 5 No 2.
- Masdiantini, P. R. dan Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (14) : 1150-1182.
- Mustikarini, W. A.dan Fitriasari, D. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Prasasti, E. 2014. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah daerah kabupaten/kota DIY tahun 2007-2013). *Jurnal Akuntansi*. Universitas PGRI Yogyakarta.

- Pratama, K. A. D., D. N. S. Werastuti, dan E. Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (1) : 1-12.
- Purwasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY tahun 2011 – 2016). *Jurnal Akuntansi*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Retnowati, R. 2016. Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rozaqi, A. 2012. Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. *Tesis*. UPN Veteran Jatim.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Sriwijaya.
- Tahar dan Suwandi. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *jurnal infestasi*. (11). No 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wicaksono, A. 2014. Metode Penelitian Kausal Komparatif (ex post facto). *Artikel Ilmiah*. Causal Comparative Research.